



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* kami panjatkan kehadiran Allah Subhahuwata'ala atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan perencanaan kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya serta program kerja strategis dan prioritas dari pemerintah daerah yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini menjadi gambaran permulaan atas apa yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan tugas dan fungsinya, baik dalam hal program kegiatan maupun kinerja anggaran. Disamping itu juga terdapat beberapa analisis terkait dengan kondisi yang telah berlangsung sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepan.

Saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini dikemudian hari.

Dengan adanya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 11 September 2025



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	 36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasionan	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	40
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 44
 BAB V PENUTUP	 60

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	17
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas	22
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	35
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Renstra Tahun 2021 – 2026	40
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	42
Tabel	Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2026	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan

pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Perangkat Daerah, yang disusun sesuai berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat

Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen Rancangan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2026 serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan RENJA Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah:

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir RENJA Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RENJA Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang diraih.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;

- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, jumlah anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2024, dalam APBD Murni tahun 2024 adalah sebesar **Rp.12.426.833.361,00**. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Selama proses berjalan, muncul kegoncangan dalam ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap segala kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Penyesuaian tersebut juga dilakukan dalam rangka mengakomodir beberapa kegiatan mendesak yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan Perubahan Anggaran.

Setelah dilakukan perubahan, jumlah anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar **Rp.12.219.901.675,00**. Pengurangan anggaran tersebut juga disejalkan dengan pengurangan dari beberapa sub kegiatan sehingga menjadi 19 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut, Realisasi fisik dari program, kegiatan serta sub kegiatan adalah sebesar **100%** dengan realisasi keuangan mencapai **91,13%** atau sebesar **Rp.11.136.176.654,00** dari total anggaran yang dikelola selama tahun 2024.

Dalam kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, juga telah dilakukan penyesuaian, dimana jumlah anggaran yang dialokasikan dalam RENSTRA sampai dengan tahun 2026 adalah sebesar **Rp.136.277.678.298,00**.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah anggaran yang dialokasikan sebagaimana yang terdapat dalam DPA Perubahan atau Pergeseran adalah sebesar **Rp.60.154.343.068,00** atau **44,14%**. Dari jumlah anggaran tersebut, yang sudah terealisasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar **Rp.57.747.190.608,00** dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar **42,37%** dari total anggaran Renstra.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun lalu dan Capaian Renstra Satpol PP dalam hal anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		136.277.678.298	46.611.013.954	12.219.901.675	11.136.176.654	91,13	12.783.760.215	69.733.528.950	51,17
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.175.189.801	42.507.773.954	11.959.788.075	10.902.014.454	91,16	12.483.563.876	65.893.352.284	65,78
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	729.672.000	124.692.220	43.280.300	42.841.400	98,99	39.827.000	207.360.620	28,42
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	35.956.215.611	15.292.054.566	5.067.636.084	4.517.513.100	89,14	11.453.133.534	31.262.701.200	86,95
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	414.000.000	108.000.000	33.564.000	33.564.000	100,00	33.564.000	175.128.000	42,30
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	3.115.050.650	1.555.723.300	0	0	0,00	156.678.000	1.712.401.300	54,97

1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	5.138.337.681	1.677.283.931	498.894.601	486.284.393	97,47	366.329.639	2.529.897.963	49,24
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	13.562.643.709	1.825.488.070	339.385.000	339.385.000	100,00	353.105.325	2.517.978.395	18,57
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.918.082.500	21.622.198.017	5.906.002.960	5.418.642.561	91,75	43.350.000	27.084.190.578	67,85
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.187.650	302.333.850	71.025.130	63.784.000	89,80	37.576.378	403.694.228	30,10
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan	31.710.049.857	2.467.637.743	260.113.600	234.162.200	90,02	300.196.339	3.001.996.282	9,47
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada								
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	20.357.530.057	1.645.483.893	127.127.600	110.293.200	86,76	126.009.199	1.881.786.292	9,24
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	8.997.695.800	526.060.650	43.836.000	34.769.000	79,32	33.433.140	594.262.790	6,60
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	2.354.824.000	296.093.200	89.150.000	89.100.000	99,94	140.754.000	525.947.200	22,33

1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	4.392.438.640	1.635.602.257	0	0	0,00	0	838.180.384	19,08
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	2.681.585.000	838.180.384	0	0	0,00	0	838.180.384	31,26
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang diinspeksi	75.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	30.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.605.853.640	797.421.873	0	0	0,00	0	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan sesuai Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor 481/Kdh.KKA.060/10.2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah dilakukan pemisahan beberapa perangkat daerah termasuk Satpol PP, yang sesuai dengan surat tersebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan nomenklatur perangkat daerah berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sementara Sub Urusan Pemadam Kebakaran sudah diampu langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Begitu juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, seiring dengan perubahan perangkat daerah, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah dilakukan penyesuaian, sehingga Sub urusan kebakaran yang sebelumnya masih menjadi salah satu indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka indikator kinerja tersebut juga sudah tidak lagi menjadi beban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak ditampilkan lagi dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbub, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang harus dipenuhi, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(8)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	-	-	-	BB (75,00)	-	
2.	Nilai Predikat AKIP			BB (74,00)	BB (78,00)	BB (81,00)	-	BB (70,60)	-	BB (81,00)	-	
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan			90%	92%	95%	-	100%	-	95%	-	
4.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3			90%	92%	95%	-	100%	-	95%	-	

Berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut;

a. Indeks Reformasi Birokrasi;

Untuk tahun 2024, terkait dengan Reformasi Birokrasi belum dilakukan pengukuran, sehingga tingkat capaian Indeks Reformasi Birokrasi belum bisa ditampilkan.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai predikat AKIP untuk tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan. Target dari indikator nilai predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah predikat BB dengan nilai capaian 74,00 (BB). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, nilai capaian masih dibawah target yaitu 70,60 atau 95,41% dari target dan predikat capaian sudah BB.

Proses pengadministrasian dan pendokumentasian pelaksanaan kinerja serta formulasi perhitungan indikator merupakan faktor utama yang menjadi kendala, sehingga capaian Nilai Predikat AKIP masih di bawah target.

- c. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan;

Sampai dengan tahun 2024, indikator tersebut masih belum terstruktur dalam pengukurannya. Maka metode yang digunakan dalam mengukur adalah dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2024. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan formulasi sehingga hasil pengukurannya lebih akuntabel.

- d. Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3

Sejalan dengan indikator pada point c, indikator tersebut masih belum terstruktur dalam pengukurannya. Maka metode yang digunakan dalam mengukur adalah dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2024. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan formulasi sehingga hasil pengukurannya lebih akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, dan sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian kinerja terkait tugas dan fungsi tersebut. Isu-isu tersebut harus dirumuskan secara cermat guna mengidentifikasi permasalahan dan solusi serta proses pelaksanaan dari

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun beberapa isu strategis yang teridentifikasi adalah :

a. Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu isu yang diangkat oleh pemerintah daerah untuk tahun 2026, dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggaran sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemenuhan hak anak. Kondisi lingkungan dan masyarakat yang tertib dan tentram serta perlindungan terhadap anak merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan perkembangan anak.

b. Kabupaten Kota Sehat.

Lingkungan yang sehat merupakan dambaan dari setiap manusia, dan merupakan salah satu faktor pendukung upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat.

c. Pengarusutamaan Gender.

Gender merupakan salah satu isu nasional yang sampai saat ini menjadi salah satu prioritas dan pembangunan nasional dalam meningkatkan peran dan fungsi sumber daya manusia dalam pembangunan.

d. Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya inovasi yang kreatif dan efektif agar pelayanan tersebut dapat berlangsung secara maksimal, efektif dan efisien dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping beberapa isu diatas, juga terdapat beberapa isu internal yang juga perlu mendapat perhatian adalah seperti:

- a. Pembinaan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan, guna meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Diperlukan adanya standarisasi kualifikasi aparatur sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara cepat, tepat dan mengena sesuai maksud dengan dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Pengawasan swakarsa yang ada dalam masyarakat, baik yang kemunculannya atas inisiasi perangkat daerah maupun atas inisiatif masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam mengemban tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Terhadap pengawasan swakarsa ini diperlukan adanya pengaturan baik terhadap kegiatan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain sehingga tidak menimbulkan benturan yang justru dapat menyebabkan terganggunya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga berakibat pada program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat berjalan dengan optimal.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tentunya tidak terlepas dari Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban upaya pencapaian Visi dan Misi Permintah Daerah. Beberapa isu mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan dan pembangunan ekonomi, upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable serta pemenuhan utilitas dasar seperti listrik dan air bersih merupakan permasalahan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tahun 2026.

Dalam rangka penyelarasan kebutuhan perangkat daerah, telah dilakukan perbandingan dari rencana kebutuhan yang mengacu kepada

dokumen Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 untuk kebutuhan tahun 2026. Keterbatasan anggaran dan adanya usulan yang muncul dari pimpinan dan legislatif menjadi salah satu isu penting yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan, sehingga terdapat beberapa anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan.

Proses penyesuaian terhadap anggaran dan indikator tersebut perlu dilakukan guna menjamin pencapaian target kinerja dan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah untuk tahun 2026.

Adapun hasil rewiuw terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut:

Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	18.624.978.801	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15.316.629.584	
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100 Persen	165.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100 Persen	125.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	65.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	65.000.000	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0	
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	-	0	
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0	
7.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000	
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen	7.091.152.543	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen	11.485.773.534	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	6.871.232.543	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	11.324.853.534	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	160.920.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	160.920.000	
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	0	
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0	
5.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	18 Laporan	18.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	-	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselasaikan	100 Persen	90.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselasaikan	100 Persen	80.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	0	
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000	
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselasaikan	100 Persen	685.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselasaikan	100 Persen	650.000.000	
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Paket	250.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Paket	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	0	
3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0	
4.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	400.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	400.000.000	
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	100 Persen	1.125.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	100 Persen	1.070.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	25.000.000	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.000.000	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
8.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.000.000	
9.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	
10.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.400.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.450.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	350.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	
5.	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	
6.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.703.826.258	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	90.856.050	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.856.050	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.856.050	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.502.970.208	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	365.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	365.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	165.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	165.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan	95 Persen	10.245.735.398				95 Persen	6.120.000.000	
			Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen					100 Persen		
i.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	95 Persen	6.745.735.398	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	95 Persen	5.070.000.000	
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	550.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	550.000.000	
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	350 Orang	1.200.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	350 Orang	1.200.000.000	
4.	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	300.000.000	
5.	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Laporan	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Laporan	1.000.000.000	
7.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Laporan	500.000.000	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	120.000.000	
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	50 Laporan	650.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	50 Laporan	650.000.000	
9.	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	2.095.735.398	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	850.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
j.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	95 Persen	3.000.000.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	95 Persen	550.000.000	
1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	50 Laporan	1.000.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	50 Laporan	180.000.000	
2.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	5 Laporan	1.000.000.000	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	5 Laporan	250.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	50 Laporan	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	50 Laporan	120.000.000	
k.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase PPNS yang aktif	70 Persen	500.000.000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase PPNS yang aktif	70 Persen	500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan	300.000.000	
2.	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	200.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	12 Laporan	0	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	0	
JUMLAH					28.870.714.199					21.436.629.584	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 dan mengacu kepada hasil dari Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2025, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun awal setelah masa transisi pemerintahan setelah proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal kondisi tersebut agar tetap kondusif. Antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya konflik of interest yang berkepanjangan harus dilakukan agar ketertiban dan keamanan di masyarakat tetap terjaga.

Adapun beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program makan bergizi gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan keiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan;
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil inndustri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
8. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Kota Sehat (KKS), Pengarusutamaan Gender (PUG), Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS), konektivitas wilayah, penerapan blue economy, inovasi daerah dan pemenuhan SPM.

Disamping itu, terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, tahun 2026 juga merupakan tahun-tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Oleh sebab itu skala prioritas baru juga

harus dilaksanakan dengan mengacu kepada perencanaan tersebut dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta kebijakan yang ditetapkan di daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk rumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi perangkat daerah. Hal ini harus dilakukan agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan mengacu kepada indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan dan perbaikan kondisi di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tetap mengacu kepada tema dan skala prioritas pembangunan daerah di tahun 2026.

Adapun Tema Pembangunan pada RKPD 2026 yaitu **“Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”**. Dengan tema tersebut telah ditetapkan prioritas pembangunan untuk tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif;
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mengimplementasikan maksud dan tujuan dari tema serta prioritas pembangunan tahun 2026, ketentraman, ketertiban, keamanan harus kondusif. Dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memastikan hal tersebut.

Mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026, tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 juga harus memperhatikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih Periode 2025-2029 (Energi Baru, Anambas Maju) adalah:

a. Visi

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”.

b. Misi

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya, dan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

- c. 9 Fokus Energi Baru Anambas Maju
1. Memangkas Rentang Kendali Atau Revitalisasi Akse Dari Dan Ke Anambas;
 2. Menciptakan Lapangan Kerja Baru;
 3. Kesejahteraan Nelayan dan Petani;
 4. Kesejahteraan Guru Ngaji, Imam Mesjid, Marbot Mesjid dan Lansia;
 5. Meningkatkan Insentif RT / RW;
 6. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan;
 7. Optimalisasi Potensi Perikanan dan Kelautan;
 8. Meningkatkan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi 12%;
 9. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Visi, Misi serta 9 fokus Energi Baru Anambas Maju merupakan harapan yang akan dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru yang diterjemahkan sebagai implementasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung upaya pencapaian tersebut.

Untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026 masih mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, yang tentu dalam implementasi akan dikolaborasikan dengan visi, misi dan 9 fokus dari Kepala Daerah baru, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk penyesuaian dari fokus maksud dan tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Sesuai RENSTRA Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditentukan yang proses penyusunannya harus direncanakan melalui proses perumusan terhadap berbagai faktor penentu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang diharapkan berlaku sehingga proses pencapaiannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih menitikberatkan pada

penegakan Peraturan Daerah dan Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Tegaknya peraturan dan kebijakan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu kepada peraturan dan keteentuan yang berlaku;
4. Kondisi strategis daerah dan nasional

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2026. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026, mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				14.086.793.197,47			18.411.776.050,00
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				14.086.793.197,47			18.411.776.050,00
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	13.795.532.727,47		100 Persen	15.756.776.050,00
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	10.425.000,00	DAU	100 Persen	50.000.000,00
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	13.066.033.197,47	DAU	100 Persen	13.660.920.000,00
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselasaikan	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	19.956.000,00	DAU	100 Persen	80.000.000,00
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselasaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	1.000.000,00	DAU	100 Persen	150.000.000,00
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselasaikan	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	236.708.675,00	DAU	100 Persen	960.000.000,00
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	353.105.325,00	DAU	100 Persen	450.000.000,00
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	90 Persen	81.557.000,00	DAU	100 Persen	140.856.050,00

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	85 Persen	26.747.530,00	DAU	100 Persen	265.000.000,00
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan terselesaikan		95 Persen	291.260.470,00		95 Persen	2.655.000.000,00
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		100 Persen			100 Persen	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	122.988.330,00	DAU	95 Persen	1.855.000.000,00
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	27.518.140,00	DAU	95 Persen	300.000.000,00
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	Kab. Kep. Anambas	70 Persen	140.754.000,00	DAU	70 Persen	500.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Mengacu pada visi, misi dan 9 Fokus Energi Baru Anambas Maju sebagaimana yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru periode 2025-2030 maka program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja juga lebih menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, upaya Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya pencapaian visi, misi dan 9 Fokus Energi Baru Anambas Maju.

Mengacu kepada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/99.a/SETDA/SD/2/2025 tanggal 27 Februari 2025, tentang Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026, Alokasi Pagu Indikatif untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp.11.977.926.680,00**. Sementara jika mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah pagu anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar **Rp.21.436.629.584,00**. Jadi terdapat selisih antara pagu RENSTRA dengan asumsi pagu awal untuk Rancangan Awal Renja Tahun 2026 sebesar **Rp.9.458.702.904,00**. Kondisi ini sudah barang tentu berdampak terhadap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026.

Dalam perkembangannya, melalui surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas nomor P/000.7.2.4/134/BAPPEDA/SD/8/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal

Penyesuaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 pada Aplikasi SIPD RI, nilai pagu indikatif untuk Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi **Rp.14.086.793.197,47**

Dengan adanya penyesuaian nilai pagu, maka untuk Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 dapat mengakomodir 2 program, 10 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Berikut Rencana Kerja Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, sebagaimana tercantum pada Tabel Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2026 berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						14.086.793.197,47							18.411.776.050,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.086.793.197,47							18.411.776.050,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.086.793.197,47							18.411.776.050,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.795.532.727,47						-	15.756.776.050,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	-			100 Persen	10.425.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.725.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	3.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				3 Data	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan</i>	-			95 Persen	13.066.033.197,47			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	13.660.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				190 Orang/bulan	12.966.793.197,47	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		13.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				70 Dokumen	99.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		160.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	-			95 %	19.956.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.956.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	-			100 Persen	1.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				40 Orang	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			95 %	236.708.675,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	960.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	5.250.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	65.978.944,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	9.355.486,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	48.438.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	3.816.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	103.868.821,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 %	353.105.325,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	353.105.325,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			90 %	81.557.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	140.856.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	61.557.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		90.856.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			85 Persen	26.747.530,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP	-	265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	22.077.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	4.670.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						291.260.470,00						-	2.655.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	-			100 Persen	122.988.330,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat	-	1.855.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				20 Dokumen	10.740.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	7.445.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				3 Dokumen	2.230.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				50 laporan	102.573.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	-			95 %	27.518.140,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	14.893.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40 Laporan	12.625.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Msyarakat		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	-			70 Persen	140.754.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	80.104.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS															
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 Laporan	60.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	OPD Satpol PP dan Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	J U M L A H							14.086.793.197,47							18.411.776.050,00		

Sebagai bahan pertimbangan bahwa, sesuai dengan rancangan kebutuhan anggaran sebagaimana terdapat pada tabel diatas, masih terdapat beberapa belanja yang merupakan kebutuhan pokok perangkat daerah yang belum bisa diakomodir, khususnya terkait dengan belanja pendidikan dan pelatihan pegawai. Dimana pada tahun 2026, diperkirakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 akan diangkat sesuai dengan kelulusan atas formasi jabatan yang disediakan dalam tes CASN tersebut, baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Calon PPPK).

Dalam rangka pengembangan kualifikasi dan kompetensi, maka seluruh fungsional Satpol PP diharuskan untuk mengikuti Pelatihan Dasar untuk diangkat menjadi fungsional Satpol PP dan juga Ujian Kompetensi untuk kenaikan jenjang bagi fungsional Satpol PP.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja, baik di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang membidangi sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun alokasi anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 selain mengacu pada RENJA ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 11 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



ZAIRIN, SH
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005